

Katalog : 4101041.73

Analisis Indikator Makro
SOSIAL
Provinsi Sulawesi Selatan
Semester 2-2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Analisis Indikator Makro
SOSIAL
Provinsi Sulawesi Selatan
Semester 2-2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ANALISIS INDIKATOR MAKRO SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMESTER 2-2021

ISSN :
Katalog BPS : 4101041.73
Nomor Publikasi : 73000.2214
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv + 26 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber Ilustrasi :
www.freepik.com

Diterbitkan dan Dicitak oleh :
© Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

***Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan,
dan/atau Menggandakan Sebagian atau Seluruh isi Buku ini Untuk
Tujuan Komersial Tanpa Izin Tertulis dari Badan Pusat Statistik.***

TIM PENYUSUN

Pengarah

Suntono

Penanggungjawab

Suri Handayani

Editor

Suri Handayani

Penulis

Daswita Tri Ariani

Desain Sampul dan Tata Letak

Muhammad Ilham Mubarak

Kata Pengantar

Publikasi Analisis Indikator Makro Sosial Sulawesi Selatan Semester 2-2021 merupakan publikasi baru yang dibuat oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan secara rutin akan terbit setiap semester. Publikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang ingin melihat perkembangan data sosial di Sulawesi Selatan secara berkala setiap semesternya. Diharapkan publikasi ini semakin memudahkan konsumen data dalam memahami data-data indikator makro sosial yang secara rutin dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Publikasi Analisis Indikator Makro Sosial Sulawesi Selatan Semester 2-2021 berisi ulasan/analisis singkat tentang data-data indikator sosial Sulawesi Selatan antara lain perkembangan kependudukan, tenaga kerja, kemiskinan serta pembangunan manusia. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, dalam publikasi ini juga disertakan penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang ditampilkan.

Semoga publikasi ini bias memberikan informasi barhagra bagi pengguna data BPS, baik aparat pemerintah maupun publik, dan diharapkan publikasi ini bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga publikasi ini bisa disajikan. Kritik dan saran akan sangat berharga untu penyempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Makassar, Maret 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan



Suntono

PENJELASAN TEKNIS

Penduduk

- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Sumber data penduduk yang tersedia secara periodik hanyalah Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk digunakan dalam proyeksi penduduk.
- Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi).

Kemiskinan

- Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)

$$GK=GKM+GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.
- Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
- Ukuran Kemiskinan
 1. *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).
 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
 3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

- Koefisien gini (Gini Rasio) didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

$$GR = 1 - \sum_{i=0}^n f_{pi} X (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

GR = Koefisien gini

F_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

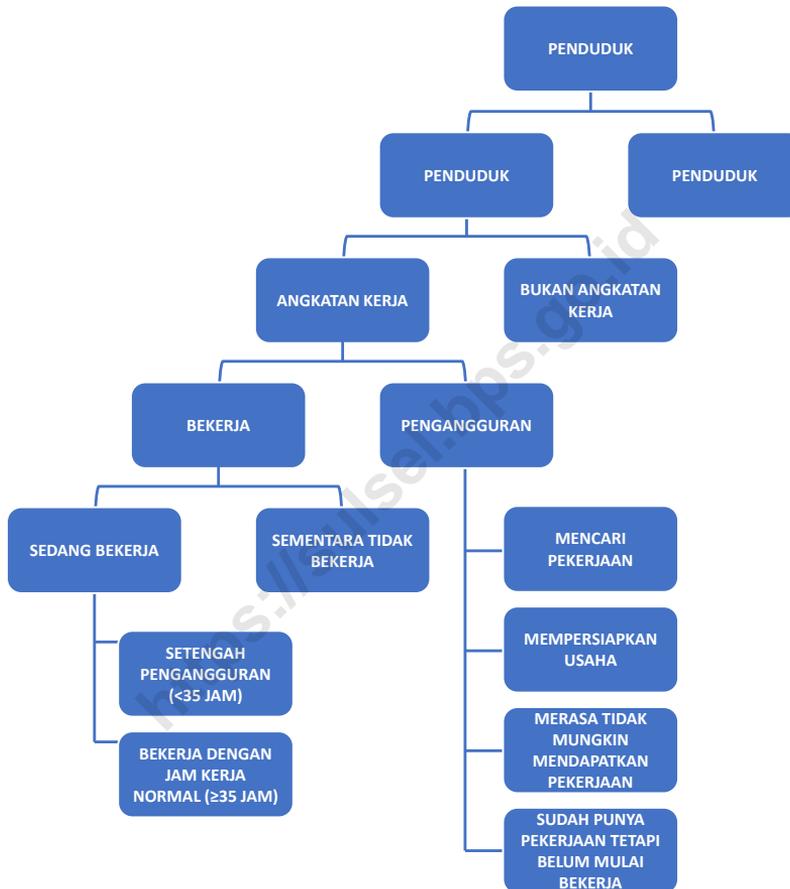
F_{ci-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

- Gini Rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
- Gini Rasio berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Gini Rasio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Ketenagakerjaan

- Konsep yang digunakan dalam data ketenagakerjaan adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.
- Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut:
- Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*).

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam perekonomian.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
- Diagram Ketenagakerjaan



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan rata-rata dari indeks *longevity*, indeks pendidikan dan indeks tingkat hidup layak. Terdapat 4 indikator (dari 3 dimensi) pembentuk angka IPM:
 1. Dimensi Kesehatan diukur dengan indikator: Umur Harapan Hidup,
 2. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator: Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah,
 3. Dimensi Hidup Layak diukur dengan indikator: Pengeluaran Perkapita Disesuaikan.

- Status pembangunan manusia
 - Rendah : < 60
 - Sedang : $60 \leq IPM < 70$
 - Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
 - Sangat tinggi : ≥ 80
- Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

<https://sulsel.bps.go.id>

Daftar Isi

v	KATA PENGANTAR
vii	PENJELASAN TEKNIS
xiii	DAFTAR ISI
1	BAB I PENDUDUK
7	BAB II KEMISKINAN
15	BAB III KETENAGAKERJAAN
21	BAB IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Daftar Gambar

- 4 : Gambar 1.1 Piramida Penduduk Sulawesi Selatan, 2021
- 9 : Gambar 2.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan, September 2017 – September 2021
- 10 : Gambar 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan, September 2017 – September 2021 (Rupiah)
- 11 : Gambar 2.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sulawesi Selatan, September 2017 – September 2021
- 18 : Gambar 3.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2018 – Agustus 2021
- 18 : Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2018 – Agustus 2021
- 19 : Gambar 3.3 Persentase Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2021
- 23 : Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan, 2011-2021
- 24 : Gambar 4.2 Tren Pertumbuhan Indeks Pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Selatan, 2013-2021
- 24 : Gambar 4.3 Komponen IPM Sulawesi Selatan Menurut Dimensi, 2020-2021

Daftar Tabel

1	•••	Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021
5	•••	Tabel 1.2	Demografi Penduduk Sulawesi Selatan, 2021 Kabupaten/Kota Penduduk (ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
9	•••	Tabel 2.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2021
11	•••	Tabel 2.2	Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komoditi di Sulawesi Selatan, September 2017 – September 2021
12	•••	Tabel 2.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah di Sulawesi Selatan, September 2017 – September 2021
13	•••	Tabel 2.4	Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, September 2017 – September 2021
14	•••	Tabel 2.5	Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Selatan, September 2018 – September 2021
17	•••	Tabel 3.1	Penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan, Agustus 2018- Agustus 2021
20	•••	Tabel 3.2	Penduduk usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2019 - Agustus 2021 (ribu orang)
20	•••	Tabel 3.3	Penduduk usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Februari 2019-Februari 2021 (ribu orang)
25	•••	Tabel 4.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2021
26	•••	Tabel 4.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota, 2020-2021

BABI PENDUDUK

<https://sulsel.bps.go.id>



PENDUDUK

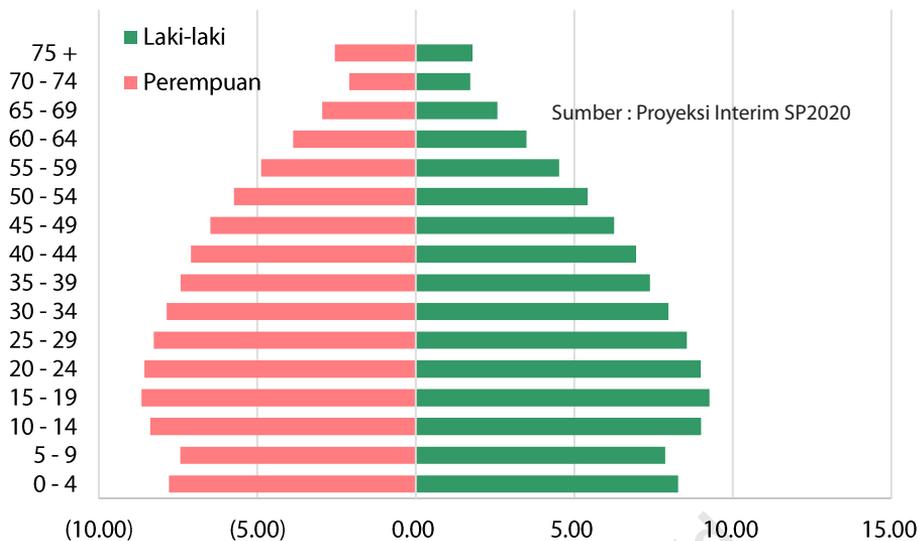
Hasil proyeksi interim penduduk dengan dasar hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Selatan hingga Juni 2021 sebanyak 9.139,53 ribu orang. Penduduk laki-laki sebanyak 4.382,65 ribu orang, sedangkan penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki yaitu sebanyak 4.538,12 ribu orang. Rasio jenis kelamin penduduk Sulawesi Selatan sebesar 98,62, artinya di antara 100 perempuan terdapat 99 laki-laki. Besarnya jumlah penduduk perempuan dibanding penduduk laki-laki terjadi pada kelompok umur 35 tahun hingga 75+, sedangkan pada kelompok umur 0 hingga 34 tahun, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Total	
0 - 4	375.407	358.196	733.603	104,80
5-9	356.822	341.808	698.630	104,39
10-14	408.484	385.378	793.862	106,00
15 - 19	420.486	398.005	818.491	105,65
20 - 24	407.777	393.778	801.555	103,56
25 - 29	387.867	380.380	768.247	101,97
30 - 34	361.719	361.328	723.047	100,11
35 - 39	335.073	341.574	676.647	98,10
40 - 44	315.274	326.198	641.472	96,65
45 - 49	284.019	298.347	582.366	95,20
50 - 54	246.198	263.978	510.176	93,26
55 - 59	205.035	224.294	429.329	91,41
60 - 64	158.419	177.951	336.370	89,02
65 - 69	116.638	136.027	252.665	85,75
70 - 74	77.836	96.619	174.455	80,56
75+	81.064	117.552	198.616	68,96
Jumlah	4.538.118	4.601.413	9.139.531	98,62

Sumber : Proyeksi Interim SP2020

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kabupaten Tana Toraja sebesar 107,29 diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Toraja Utara dengan rasio jenis kelamin masing-masing sebesar 105,99 dan 104,40. Sedangkan Kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adah Kabupaten Soppeng (92,90), Kabupaten Wajo (94,39) dan Kabupaten Bulukumba (95,24).



Gambar 1.1 Piramida Penduduk Sulawesi Selatan, 2021

Piramida penduduk Sulawesi Selatan tahun 2021 termasuk tipe expansive dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Gambar di bawah menunjukkan piramida yang masih lebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah, sedangkan pada bagian atas meruncing.

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia nonproduktif (penduduk 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hasil proyeksi penduduk menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 45,36. Angka ini mengandung makna bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia nonproduktif sekitar 46 orang.

Berdasarkan proporsinya, pada tahun 2021 penduduk Sulawesi Selatan sebagian besar berdomisili di Kota Makassar, yaitu sebesar 15,62 persen di tahun 2021, diikuti oleh Kabupaten Bone (8,83 persen) dan Kabupaten Gowa (8,46 persen). Sebaliknya, 3 Kabupaten/kota dengan proporsi penduduk terendah yaitu Kabupaten Selayar, Kota Parepare dan Kabupaten Barru dengan proporsi masing-masing sebesar 1,51 persen; 1,67 persen dan 2,03 persen.

Tabel 1.2 Demografi Penduduk Sulawesi Selatan, 2021

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin	Rasio Ketergantungan
Selayar	137	102	96,37	45,77
Bulukumba	440	343	95,24	42,14
Bantaeng	197	500	97,88	40,67
Jeneponto	405	574	97,78	43,56
Takalar	302	534	95,53	45,81
Gowa	773	411	98,45	44,38
Sinjai	261	327	97,96	44,97
Maros	396	245	100,65	45,86
Pangkep	348	308	96,13	47,25
Barru	185	158	95,79	48,30
Bone	806	177	95,53	45,59
Soppeng	235	151	92,90	45,16
Wajo	379	152	94,39	44,01
Sidrap	323	172	98,05	47,09
Pinrang	407	208	97,55	46,71
Enrekang	227	127	103,72	48,23
Luwu	367	110	101,52	47,83
Tana Toraja	285	143	107,29	44,96
Luwu Utara	325	43	102,16	44,68
Luwu Timur	300	43	105,99	48,71
Toraja Utara	264	217	104,40	54,92
Makassar	1.427	7.165	99,22	43,42
Parepare	152	1.540	98,34	45,63
Palopo	187	740	100,25	44,79
Sulawesi Selatan	9.139	196	98,62	45,36

Sumber : Proyeksi Interim SP2020

BAB II

KEMISKINAN

<https://sulsel.bps.go.id>



KEMISKINAN

2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Penduduk miskin di Sulawesi Selatan keadaan September 2021 berjumlah 765,46 ribu jiwa atau 8,53 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Apabila dilihat berdasarkan gambar 2.1, penduduk miskin mengalami penurunan secara persentase yaitu sebesar 0,46 poin. Selain itu juga mengalami penurunan secara absolut sebesar 34,78 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi September 2020 yang besarnya 8,99 persen atau 800,24 ribu jiwa.



Gambar 2.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan, September 2017 – September 2021

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar berada di pedesaan. Pada September 2021, penduduk miskin di pedesaan masih mencapai 566,62 ribu jiwa (74,02 persen). Sementara di daerah perkotaan hanya 198,84 ribu jiwa (25,98 persen). Dibandingkan dengan keadaan September 2020, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 3,76 ribu jiwa, sedangkan daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 38,54 ribu jiwa.

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Sep-17	166,50	659,47	825,97	4,76	12,65	9,48
Sep-18	168,70	610,94	779,64	4,48	12,15	8,87
Sep-19	162,39	597,19	759,58	4,22	11,90	8,56
Sep-20	195,08	605,16	800,24	4,92	12,25	8,99
Sep-21	198,84	566,62	765,46	4,89	11,55	8,53

Persentase penduduk miskin di pedesaan juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan di perkotaan. Pada September 2021 penduduk miskin di pedesaan mencapai 11,55 persen sedangkan di perkotaan hanya sebesar 4,89 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada September 2020, terjadi penurunan persentase baik di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk perkotaan, persentase penduduk miskin turun sebesar 0,03 poin sedangkan untuk pedesaan sebesar 0,70 poin.

2.2. Perubahan Garis Kemiskinan September 2017 – September 2021

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.



Gambar 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan, September 2017 – September 2021 (Rupiah)

Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan pada September 2021 sebesar Rp 384.455. Apabila dilihat dari perkembangannya, Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan September 2020, kenaikan garis kemiskinan di tahun 2021 sebesar 6,19 persen.

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Berdasarkan proporsinya, terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).

Pada September 2020, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,91 persen, hal yang sama terjadi pada September 2021 yang memiliki peranan relatif sama namun mengalami sedikit penurunan menjadi 74,77 persen. Peranan GKM terhadap GK untuk daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 70,62 persen dan pada September 2021 mengalami peningkatan menjadi 70,86 persen. Sedangkan untuk daerah pedesaan, pada September 2021 sebesar 78,32 persen yang meningkat 0,27 poin dari September 2020 sebesar 78,58 persen.

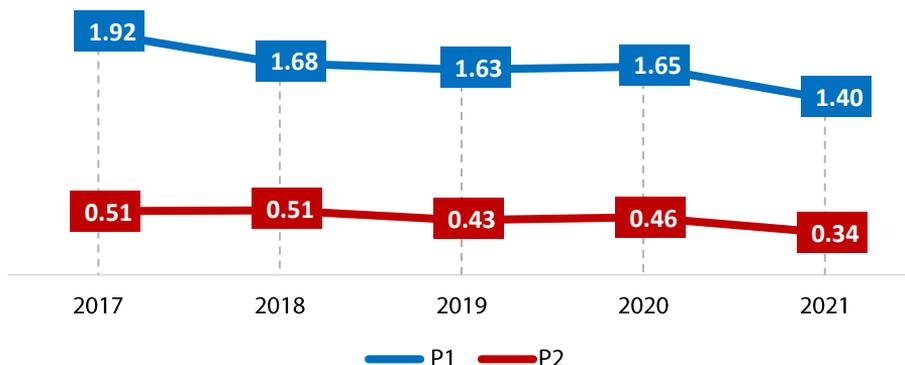
Tabel 2.2 Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komoditi di Sulawesi Selatan, September 2017 – September 2021

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Sep-17	209.432	94.402	303.834
Sep-18	230.868	96.858	327.725
Sep-19	251.107	103.663	354.770
Sep-20	265.149	110.314	375.463
Sep-21	286.095	117.656	403.751
Perdesaan			
Sep-17	226.047	61.741	287.788
Sep-18	240.453	65.797	306.250
Sep-19	260.579	70.484	331.063
Sep-20	275.659	75.132	350.791
Sep-21	288.566	79.900	368.465
Perkotaan+Pedesaan			
Sep-17	219.551	74.807	294.358
Sep-18	236.639	79.099	315.738
Sep-19	256.826	84.729	341.555
Sep-20	271.199	90.832	362.031
Sep-21	287.467	96.988	384.455

Sebaliknya, sumbangan GKBM terhadap GK cukup kecil baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pada September 2020 untuk daerah perkotaan, sumbangan GKBM terhadap GK sebesar 29,38 persen dan mengalami penurunan pada September 2021 sebesar 0,24 poin menjadi 29,14 persen. Hal yang sama juga terjadi pada daerah pedesaan. Pada September 2020 peranannya sebesar 21,42 persen, dan menjadi 21,68 persen pada September 2021.

2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Sama halnya dengan yang terjadi pada jumlah dan persentase penduduk miskin yang relatif mengalami penurunan, untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan relatif mengalami penurunan sejak September 2017 hingga September 2021. Gambar 2.3 menunjukkan nilai P1 dan P2 mengalami penurunan sebesar 0,52 poin dan 0,17 poin sepanjang periode 2017-2021.



Gambar 2.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sulawesi Selatan, September 2017 – September 2021

Pada periode September 2020 – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung turun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun 0,25 poin dari 1,65 pada keadaan September 2020 menjadi 1,40 pada keadaan September 2021. Penurunan sebesar 0,12 poin juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dari 0,46 pada keadaan September 2020 menjadi 0,34 pada keadaan September 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin pada periode September 2021 semakin berkurang jika dibandingkan dengan keadaan pada September 2020.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah pedesaan jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pada Maret 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,63 sementara di daerah pedesaan mencapai 2,04. Begitupun dengan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan yakni sebesar 0,14 sementara daerah pedesaan mencapai 0,50. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan di daerah perkotaan lebih baik daripada pedesaan.

Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah di Sulawesi Selatan, September 2017 – September 2021

Indeks/Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Sep-17	0,83	2,65	1,92
Sep-18	0,56	2,52	1,68
Sep-19	0,81	2,26	1,63
Sep-20	0,81	2,32	1,65
Sep-21	0,63	2,04	1,40
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Sep-17	0,19	0,72	0,51
Sep-18	0,11	0,82	0,51
Sep-19	0,20	0,62	0,43
Sep-20	0,18	0,68	0,46
Sep-21	0,14	0,50	0,34

Berdasarkan tabel 2.3 terlihat bahwa nilai P1 untuk daerah perkotaan turun 0,18 poin dari 0,81 pada September 2020 menjadi 0,63 pada September 2021. Sejalan dengan daerah perkotaan, nilai P1 untuk daerah pedesaan juga mengalami penurunan sebesar 0,29 poin dari 2,32 pada September 2020 menjadi 2,04 pada September 2021.

Hal yang sama terjadi pada nilai P2. Daerah perkotaan mengalami penurunan 0,04 poin dari 0,18 pada September 2020 menjadi 0,14 pada September 2021. Sedangkan untuk daerah pedesaan, terjadi penurunan sebesar 0,18 poin dari 0,68 pada September 2020 menjadi 0,50 pada September 2021.

2.4 Perkembangan Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio pada September 2017 yang tercatat sebesar 0,429 mengalami sedikit penurunan pada September 2018 menjadi 0,388, kemudian meningkat pada September 2019 menjadi 0,391, lalu kembali mengalami penurunan pada September 2020 menjadi 0,382, dan turun menjadi 0,377 pada September 2021.

Tabel 2.4 Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, September 2017 – September 2021

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
Sep-17	0,444	0,332	0,429
Sep-18	0,391	0,353	0,388
Sep-19	0,393	0,354	0,391
Sep-20	0,384	0,352	0,382
Sep-21	0,387	0,334	0,377

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2017 hingga September 2021, nilai Gini Ratio di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Meskipun memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh, hal ini tetap memperlihatkan bahwa ketimpangan yang terjadi di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,003 poin. Di daerah pedesaan pun, nilai Gini Ratio mengalami penurunan sebesar 0,018 poin pada September 2021 jika dibandingkan dengan September 2020.

2.5 Perkembangan Distribusi Pengeluaran

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang lebih dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,67 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2020, terjadi penurunan sebesar 0,28 poin.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 17,19 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mengalami penurunan 0,59 poin jika dibandingkan dengan keadaan September 2020 yang sebesar 17,78 persen.

Untuk daerah pedesaan, persentase penduduk 40 persen terbawah tercatat sebesar 19,27 persen pada September 2021 yang menunjukkan bahwa kelompok tersebut juga berada pada ketimpangan rendah. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,17 poin dari 19,44 pada September 2020.

Tabel 2.5 Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Selatan, September 2018 – September 2021

Daerah/Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Atas
Perkotaan			
Sep-18	16,64	38,18	45,19
Sep-19	16,37	38,53	45,10
Sep-20	17,78	36,02	46,20
Sep-21	17,19	37,11	45,70
Perdesaan			
Sep-18	18,24	39,97	41,79
Sep-19	18,48	39,22	42,30
Sep-20	19,44	37,21	43,35
Sep-21	19,27	40,14	40,59
Perkotaan+Pedesaan			
Sep-18	16,95	37,60	45,45
Sep-19	16,71	37,73	45,56
Sep-20	17,95	36,18	45,87
Sep-21	17,67	37,63	44,70

BAB III

KETENAGAKERJAAN

<https://sulsel.bps.go.id>



KETENAGAKERJAAN

3.1. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan

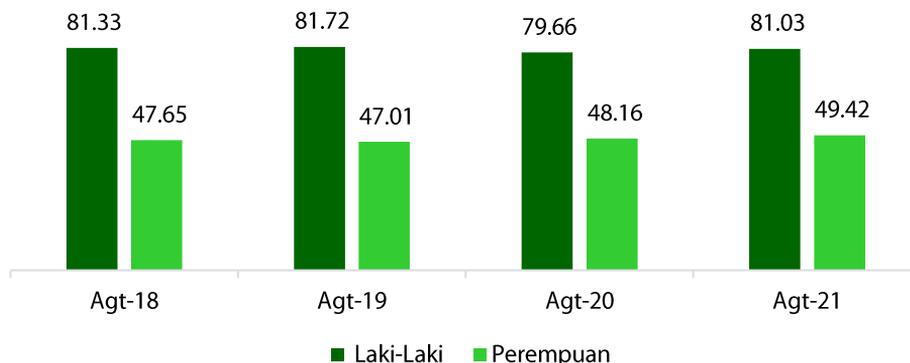
Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Selatan pada Agustus 2021 sebesar 4.412.782 orang, angka ini terdiri dari 4.160.433 penduduk yang bekerja, atau sekitar 94,28 persen dari total angkatan kerja. Sedangkan 5,72 persen sisanya atau sekitar 252.349 orang adalah pengangguran. Jika dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2020, jumlah penduduk usia 15 tahun yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 3,84 persen, sedangkan yang menganggur turun 6,47 persen.

Tabel 3.1 Penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan, Agustus 2018- Agustus 2021

Kegiatan	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	4.214.722	4.255.374	4.276.437	4.412.782
Bekerja	4.006.309	4.058.595	4.006.620	4.160.433
(%)	95,06	95,38	93,69	94,28
Penganggur	208.413	196.779	269.817	252.349
(%)	4,94	4,62	6,31	5,72
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,93	63,80	63,40	64,73
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	4,62	6,31	5,72

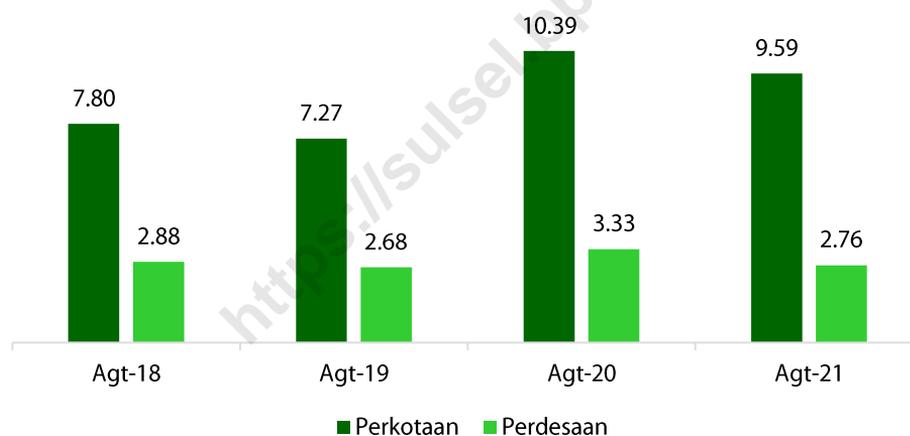
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 64,73 persen. Dibandingkan keadaan pada Agustus 2020, TPAK mengalami peningkatan sebesar 1,33 poin dari 63,40 persen. Adanya peningkatan nilai TPAK menunjukkan bahwa terdapat indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang juga meningkat.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan. Pada Agustus 2021, TPAK laki-laki mencapai 81,03 persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 49,42 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TPAK laki-laki mengalami peningkatan 1,37 poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan 1,26 poin. Besarnya gap antara TPAK laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja jika dibandingkan dengan laki-laki.



Gambar 3.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2018 – Agustus 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada Agustus 2021, TPT Sulawesi Selatan sebesar 5,72 persen, mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020 yang besarnya 6,31 persen.



Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2018 – Agustus 2021

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Pada Agustus 2021, TPT perkotaan mencapai 9,59 persen dan TPT pedesaan hanya sebesar 2,76 persen. Sepanjang periode Agustus 2018 - Agustus 2021, TPT perkotaan nilainya fluktuatif namun cenderung meningkat, dari 7,80 persen pada Agustus 2018 hingga menjadi 9,59 persen pada Agustus 2021. TPT Pedesaan juga pada umumnya mengalami penurunan. Meskipun TPT Pedesaan Agustus 2019 - Agustus 2020 sempat mengalami peningkatan dari 2,68 persen menjadi 3,33 persen, namun TPT Pedesaan mengalami penurunan menjadi 2,76 persen di Agustus 2021.

3.2. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah penduduk pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2021 didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 37,43 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,75 persen serta Industri Pengolahan sebesar 8,47 persen.



Gambar 3.3 Persentase Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2021

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat 11 lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase jumlah penduduk yang bekerja, dengan peningkatan terbesar terjadi pada lapangan pekerjaan Perdagangan yang meningkat sebesar 0,90 poin; Konstruksi yang meningkat 0,67 poin; serta lapangan pekerjaan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,42 poin. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya terjadi pada lapangan Pertanian sebesar 2,35 poin; Jasa Lainnya sebesar 0,48 poin; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,45 poin.

3.3. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kaategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, pada Agustus 2021 sebanyak 1,53 juta orang (36,76 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 2,63 juta orang (63,24 persen) bekerja kegiatan informal.

Dalam setahun terakhir (Agustus 2020 – Agustus 2021), peningkatan persentase penduduk bekerja tertinggi pada status buruh/karyawan/pegawai (0,97 poin). Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada status pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 0,90 poin.

Tabel 3.2 Penduduk usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2019 - Agustus 2021 (ribu orang)

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
Berusaha Sendiri	920,59	848,56	874,83
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	729,49	784,58	815,41
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	146,16	128,77	134,28
Buruh/ karyawan/pegawai	1.455,14	1.304,68	1.395,07
Pekerja bebas di pertanian	115,94	133,29	126,18
Pekerja bebas di nonpertanian	118,90	118,00	136,92
Pekerja keluarga/tak dibayar	572,38	688,75	677,74
Jumlah	4.058,60	4.006,62	4.160,43

Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Agustus 2020 – Agustus 2021) jumlah pekerja informal turun sebanyak 57,91 ribu orang.

3.4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2021 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 2.292,13 ribu orang (55,09 persen). Sedangkan pekerja berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 1.154,10 ribu orang (27,74 persen). Penduduk berpendidikan tinggi hanya sebanyak 714,20 ribu orang (17,17 persen) terdiri dari 113,18 ribu orang berpendidikan Diploma I/II/III dan 601,02 ribu orang berpendidikan universitas.

Tabel 3.3 Penduduk usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Februari 2019-Februari 2021 (ribu orang)

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2018	2019	2020	2021
1. SD ke bawah	1.726,90	1.677,40	1.632,33	1.674,65
2. Sekolah Menengah Pertama	636,30	602,10	631,20	617,48
3. Sekolah Menengah Atas	766,90	790,20	798,76	828,39
4. Sekolah Menengah Kejuruan	265,50	313,60	287,14	325,71
5. Diploma I/II/III	87,80	110,30	106,04	113,18
6. Universitas	522,80	565,10	551,15	601,02
Jumlah	4.006,30	4.058,60	4.006,62	4.160,43

Dibandingkan keadaan tahun sebelumnya (Agustus 2020- Agustus 2021), peningkatan persentase penduduk bekerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan terjadi pada penduduk dengan pendidikan tertinggi universitas (0,69 poin); SMK (0,66 poin); serta dan Diploma I/II/III (0,07 poin). Sementara penurunan persentase terdapat pada penduduk bekerja berpendidikan SMP (0,91 poin), SD ke bawah (0,49 poin) serta SMA (0,02 poin).

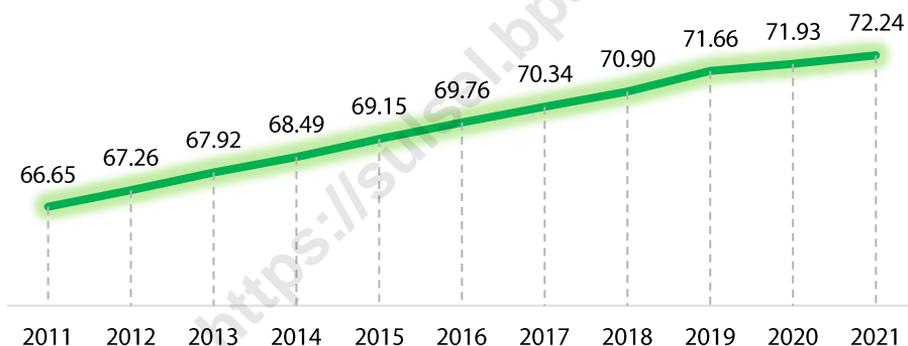
BAB IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1. Perkembangan IPM

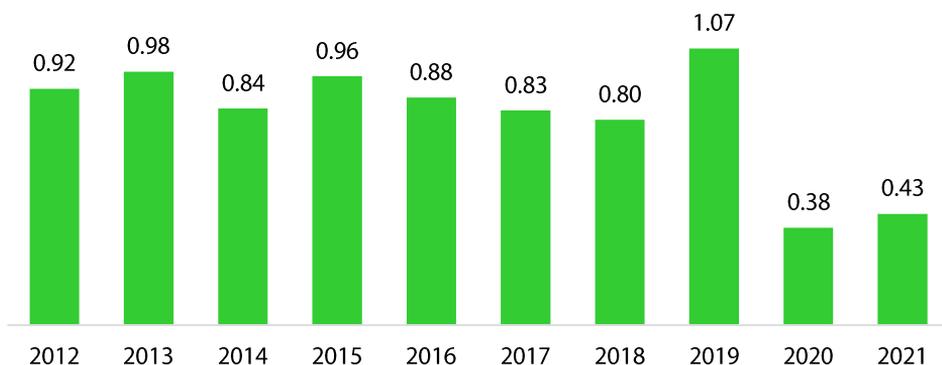
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indicator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita.



Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan, 2011 - 2021

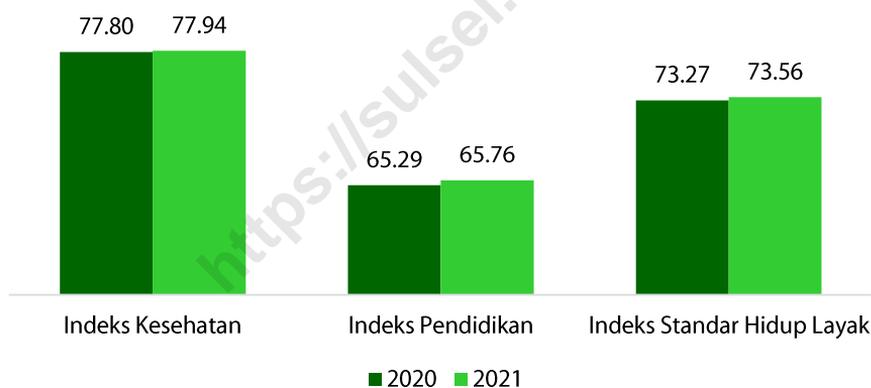
BaBadan Pusat Statistik melakukan pengukuran IPM dengan menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) dan Proyeksi Penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015).

Pada tahun 2021, angka IPM Sulawesi Selatan sebesar 72,24. IPM Sulawesi Selatan tumbuh 0,43 persen atau bertambah 0,31 poin dibandingkan IPM tahun 2020. Pertumbuhan tersebut baik bila dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 0,38 persen.



Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan, 2012-2021

Pertumbuhan IPM pada tahun 2021 didorong oleh peningkatan semua indeks komponen pembentuknya. Indeks pendidikan merupakan komponen IPM yang mengalami akselerasi paling tinggi. Pada tahun 2021 indeks pendidikan mencapai 65,76 atau meningkat 0,46 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan indeks pendidikan utamanya disebabkan oleh capaian indeks rata-rata lama sekolah yang meningkat sebesar 0,95 persen atau 0,53 poin. Hal ini menggambarkan semakin tingginya penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal hingga kelas VIII (SMP kelas II).



Gambar 4.3 Komponen IPM Sulawesi Selatan Menurut Dimensi, 2020-2021

Sementara itu, peningkatan indeks standar hidup layak pada tahun 2019 sebesar 0,39 persen atau meningkat 0,29 poin. Sedangkan untuk indeks kesehatan yang diwakili oleh umur harapan hidup mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar yakni hanya sebesar 0,18 persen atau meningkat 0,14 poin.

Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2021

Kabupaten/Kota	2020	2021	Rank IPM 2021	Laju IPM 2020-2021 (%)	Rank Laju IPM 2020-2021
Selayar	67,38	67,76	20	0,56	9
Bulukumba	68,99	69,62	14	0,91	2
Bantaeng	68,73	68,99	18	0,38	18
Jeneponto	64,26	64,56	24	0,47	13
Takalar	67,31	67,72	22	0,61	7
Gowa	70,14	70,29	11	0,21	21
Sinjai	67,60	67,75	21	0,22	20
Maros	69,86	70,41	10	0,79	3
Pangkep	68,72	69,21	17	0,71	4
Barru	71,00	71,13	8	0,18	23
Bone	66,06	66,40	23	0,51	10
Soppeng	68,67	68,99	18	0,47	14
Wajo	69,15	69,62	14	0,68	5
Sidrap	71,21	71,54	6	0,46	15
Pinrang	71,26	71,45	7	0,27	19
Enrekang	72,76	72,91	5	0,21	22
Luwu	70,51	70,85	9	0,48	12
Tana Toraja	68,75	69,49	16	1,08	1
Luwu Utara	69,57	70,02	12	0,65	6
Luwu Timur	73,22	73,34	4	0,16	24
Toraja Utara	69,33	69,75	13	0,61	8
Makassar	82,25	82,66	1	0,50	11
Parepare	77,86	78,21	3	0,45	16
Palopo	78,06	78,38	2	0,41	17
Sulawesi Selatan	71,93	72,24	-	0,43	-

Pada periode 2020-2021, tercatat tiga Kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Tana Toraja (1,08 persen), Kabupaten Bulukumba (0,91 persen) dan Kabupaten Maros (0,79 persen). Sebaliknya, pada periode yang sama, tercatat tiga Kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling lambat yaitu Kabupaten Luwu Timur (0,16 persen), Kabupaten Barru (0,18 persen) dan Kabupaten Enrekang (0,21 persen).

Berdasarkan status pencapaiannya, pada tahun 2021 hanya Kota Makassar menjadi satu-satunya Kabupaten/kota yang berstatus “sangat tinggi”, 11 Kabupaten/kota telah berstatus pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Luwu Utara. Sementara 12 Kabupaten/kota lainnya masih berstatus “sedang”. Pada tahun 2021, terdapat 2 Kabupaten yang mengalami perubahan status dari “sedang” menjadi “tinggi” yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Luwu Utara. Level pembangunan manusia yang relatif merata ini mengindikasikan bahwa disparitas pembangunan manusia antar Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan relatif rendah.

Jika melihat indikator pembentuk IPM di Kabupaten/kota, untuk variabel umur harapan hidup pada tahun 2021, Kabupaten Toraja Utara memiliki UHH tertinggi sebesar 73,41 tahun diikuti oleh Kabupaten Tana Toraja dan Kota Makassar yang masing-masing sebesar 73,40 tahun dan 72,13 tahun. Sedangkan Kabupaten/kota yang memiliki UHH terendah adalah Kabupaten Jeneponto (66,49 tahun), Kabupaten Pangkajene Kepulauan (66,78 tahun) dan Kabupaten Bone (67,21 tahun).

Selanjutnya untuk indikator pendidikan yang terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kabupaten/kota yang memiliki angka harapan lama sekolah tertinggi adalah Kota Makassar (15,58 tahun) diikuti Kota Palopo (15,09 tahun) dan Kota Parepare (14,51 tahun). Sebaliknya, Kabupaten Bantaeng (12,05 tahun), Kabupaten Jeneponto (12,10 tahun) dan Kabupaten Takalar (12,42 tahun) merupakan Kabupaten/kota dengan harapan lama sekolah terkecil. Seperti halnya harapan lama sekolah, Kota Makassar, Palopo dan Parepare juga menempati posisi tiga teratas untuk Kabupaten/kota yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi.

Standar hidup layak yang digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan menunjukkan bahwa Kota Makassar, Parepare dan Palopo juga menempati urutan teratas untuk indikator ini, sedangkan yang berada pada tiga terendah adalah Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Bone.

Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota, 2020-2021

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Selayar	68,46	68,52	12,65	12,66	7,88	8,08	8.970	9.060
Bulukumba	67,92	68,10	13,17	13,41	7,67	7,82	10.513	10.632
Bantaeng	70,54	70,60	12,04	12,05	6,72	6,77	11.632	11.829
Jeneponto	66,39	66,49	11,98	12,10	6,59	6,60	9.114	9.215
Takalar	67,18	67,30	12,41	12,42	7,29	7,49	10.454	10.543
Gowa	70,43	70,45	13,64	13,65	8,19	8,20	9.394	9.504
Sinjai	67,30	67,38	13,05	13,06	7,75	7,78	9.439	9.505
Maros	69,02	69,04	13,04	13,16	7,73	8,01	10.963	11.032
Pangkep	66,66	66,78	12,76	12,77	7,66	7,92	11.405	11.519
Barru	69,02	69,07	13,58	13,59	8,23	8,24	10.923	11.017
Bone	67,07	67,21	12,88	12,98	7,15	7,23	8.963	9.030
Soppeng	69,65	69,81	12,90	13,05	7,81	7,82	9.483	9.558
Wajo	67,35	67,48	13,14	13,15	6,81	7,05	12.386	12.505
Sidrap	69,83	70,01	12,94	12,95	7,84	7,94	12.073	12.201
Pinrang	69,61	69,77	13,23	13,24	7,86	7,87	11.844	11.956
Enrekang	70,91	70,93	13,70	13,71	8,90	8,91	10.844	10.973
Luwu	70,34	70,44	13,33	13,39	8,24	8,35	10.014	10.116
Tana Toraja	73,30	73,40	13,80	13,86	8,26	8,51	7.217	7.434
Luwu Utara	68,51	68,67	12,43	12,57	7,79	7,86	11.562	11.736
Luwu Timur	70,53	70,63	12,83	12,84	8,80	8,81	12.814	12.886
Toraja Utara	73,39	73,41	13,38	13,39	7,96	8,25	8.097	8.134
Makassar	72,09	72,13	15,57	15,58	11,21	11,43	16.873	17.097
Parepare	71,27	71,31	14,50	14,51	10,45	10,65	13.663	13.786
Palopo	70,88	70,92	15,08	15,09	10,76	10,94	12.995	13.117
Sulawesi Selatan	70,57	70,66	13,45	13,52	8,38	8,46	11.079	11.184

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125
Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>
E-mail: bps7300@bps.go.id